

Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015

Luthfi Makhasin*

Abstract

This article explains the making of intra party coalition prior to and during simultaneous local direct election phase I in Central Java Province, held in 9 December 2015. Referring to and modifying from the current scholarly works on the coalition making and politico-ideological orientation of political party in Indonesia, it offers four typologies of intra party coalition which are small ideological coalition, small pragmatic coalition, grand ideological coalition, and grand pragmatic coalition. The case of coalition making in the local direct election in 21 districts/municipalities in Central Java Province reveals that political party is a powerful and irreplaceable political player in democratic setting. As a formal political institution, it is and will remain considerably influential in nominating and endorsing candidates to run in the local direct election.

Keywords:

local direct election; coalition; political party; candidacy; Central Java.

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang pembentukan koalisi lintas partai politik menjelang dan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung serentak tahap satu yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 di Jawa Tengah. Dengan modifikasi dari literatur yang ada tentang pembentukan koalisi dan orientasi partai politik di Indonesia, tulisan ini menawarkan empat tipologi koalisi yaitu Koalisi Kecil-Ideologis (KKI), Koalisi Kecil-Pragmatis (KKP), Koalisi Besar-Ideologis (KBI) dan Koalisi Besar-Pragmatis (KBP). Pilkada serentak di Jawa Tengah menunjukkan bahwa partai politik tetap tidak tergantikan sebagai lembaga demokrasi untuk mengusung dan mendorong pencalonan seseorang menduduki jabatan politik sebagai kepala daerah.

Keywords:

pilkada, koalisi, partai politik; pencalonan; Jawa Tengah.

Pendahuluan

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melantik 17 kepala daerah hasil Pilkada serentak di Lapangan Simpanlima Semarang,

Jawa Tengah, pada hari Rabu, 17 Februari 2016. Mereka adalah sebagian besar dari 21 kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015. Sedangkan empat kepala daerah terpilih (Kabupaten Demak, Grobogan, Pekalongan dan Sragen) akan dilantik setelah masa jabatan kepala daerah periode sebelumnya berakhir pada

* Staf Pengajar di Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed
Purwokerto
Email: luthfi.makhasin@gmail.com

Februari 2016 karena sengketa yang belum selesai dan sebab lainnya. Pelantikan ini menandai berakhirnya gelombang pertama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu berarti bahwa 60 persen Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah berhasil menyelenggarakan pergantian kepala daerah, sedangkan sisa 14 Kabupaten/Kota dan pemilihan gubernur akan dilaksanakan pada Pilkada serentak gelombang berikutnya di tahun 2017 dan 2018.

Dominasi PDIP dalam Pilkada serentak memang tidak mengejutkan karena Jawa Tengah sejak lama dikenal sebagai basis utama partai banteng moncong putih. Namun jika diamati lebih jauh dinamika politik yang terjadi di setiap kabupaten/kota, cerita dominasi PDIP di Jawa Tengah menjadi lebih kompleks. Dari 13 kabupaten/kota dimana kandidat PDIP diklaim memenangkan pertarungan, hanya empat daerah (Sukoharjo, Kota Surakarta, Boyolali dan Pemalang) yang murni dimenangkan PDIP lewat dukungan tunggal, sedangkan sembilan daerah lainnya PDIP memenangkan Pilkada melalui kerjasama dengan partai politik lainnya. Di Kabupaten Demak, PDIP bahkan tidak mengajukan secara resmi kandidatnya sendiri tapi hanya mendukung belakangan pasangan yang telah diajukan sebelumnya oleh Golkar dan PPP.

Meskipun pembentukan koalisi seringkali dibangun sekedar memenuhi prasyarat administratif pencalonan, pembahasan topik ini penting untuk mengetahui sejauh mana pelembagaan partai di tingkat lokal terjadi dan pendalaman demokrasi dijalankan. Dalam konteks yang berbeda, pembahasan tentang pembentukan koalisi di tingkat lokal juga penting untuk memahami tentang pentingnya partai politik dalam pembentukan pemerintahan (Back, 2005; Laver, 1989). Artikel ini berargumen bahwa partai politik tingkat lokal memainkan peran penting dalam pembentukan koalisi dan kandidat seseorang untuk maju dalam Pilkada. Pembahasan tentang pembentukan

koalisi memberikan pandangan alternatif bagi pandangan umum yang sudah diterima luas tentang karakteristik partai politik di Indonesia sebagai sekedar pencari rente yang tidak kompeten (Pratikno, 2009: 53-73, 2007: 415-438), dan lemah secara kelembagaan (Fionna, 2013; Choi, 2009: 74-100; Tan, 2008: 88-114).

Dalam konteks yang lebih luas, artikel ini diharapkan dapat mengisi ruang kosong yang ditinggalkan para peneliti dan ilmuwan politik yang biasanya lebih menitikberatkan pada peran penting popularitas dan kharisma pribadi kandidat (Buehler, 2009: 101-124; Vel, 2005: 81-107), politik uang dan kekayaan (Hidayat, 2009: 125-146), strategi kampanye dan peran media (Hill, 2009: 229-258), peran *polling* opini publik dan lembaga survei (Meitzner, 2009: 95-126), fragmentasi intra partai politik (Tomsa, 2014: 249-278), dan menguatnya politik dinasti/keluarga sebagai faktor penentu dalam Pilkada (Kenawas, 2013).

Untuk mendukung argumen, tulisan ini akan terdiri dari enam bagian. Dalam bagian pendahuluan penulis menjelaskan tentang latar belakang dan signifikasi tulisan. Bagian kedua dan ketiga menjelaskan tentang metode pengumpulan data dan kerangka analisis/teoretik yang digunakan. Bagian keempat membahas secara singkat tentang peta politik Jawa Tengah sebelum pelaksanaan Pilkada termasuk penjelasan singkat tentang kekuatan politik di kabupaten/kota dan hasil Pilkada secara umum. Kelima, tulisan ini mengelaborasi empat tipe koalisi yang terbentuk dalam Pilkada yaitu Koalisi Kecil Ideologis, Koalisi Kecil Pragmatis, Koalisi Besar Ideologis dan Koalisi Besar Pragmatis. Tulisan ini ditutup dengan kesimpulan yang berisi uraian temuan-temuan penting yang telah dibahas di bagian sebelumnya.

Metode Penelitian

Data untuk mendukung argumen tulisan ini didapatkan dari studi dokumen dan analisis isi dari laporan media, baik cetak maupun daring yang terbit menjelang, selama dan

setelah pelaksanaan Pilkada serentak 2015 di Jawa Tengah. Sebagian besar dokumen didapatkan dari website KPU, sedangkan analisis isi diperoleh dari kliping koran dan pencarian di internet atas laporan harian Suara Merdeka, Tribunews, Tempo, Kompas, Jawa Pos/Radar, dan lainnya atas pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015 di Jawa Tengah. Perspektif yang digunakan dalam tulisan ini adalah perbandingan, bukan saja menerapkan kerangka pemikiran tentang pembentukan koalisi yang berlaku di sistem demokrasi parlementer mapan di Barat untuk menjelaskan relevansinya dalam konteks domestik tapi juga membandingkan variasi lokalnya di Indonesia. Meskipun analisisnya didasarkan atas pelaksanaan Pilkada di 21 kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah, pembahasannya didasarkan atas pengamatan terfokus atas pelaksanaan Pilkada di 15 kabupaten/kota yang kandidat pemenangnya berasal dari koalisi lintas partai.

Perspektif Teoretik tentang Pembentukan Koalisi

Pembentukan koalisi adalah salah satu kajian yang telah menarik minat para ilmuwan sosial sejak lama (Neumann and Morgenstern, 1953; Riker, 1962; Axelrod, 1970). Koalisi menjadi subjek kajian yang menarik karena dalam sistem multi partai, tidak ada satupun partai politik yang mampu berkuasa tanpa membangun kerjasama dengan partai politik lainnya. Dalam literatur kesarjanaan, terdapat dua model/ pendekatan/kerangka teoretik utama yang biasanya digunakan untuk menjelaskan pembentukan koalisi, yaitu pendekatan *office-seeking* dan *policy-seeking* (Laver, 1998:5). Masing-masing pendekatan ini memiliki variasinya dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya masing-masing.

Pendekatan *office-seeking* berangkat dari kerangka teoretik pilihan rasional dan teori permainan. Pendekatan *office-seeking* berangkat dari asumsi bahwa partai adalah entitas yang

tunggal (*single entity*), memiliki kecenderungan kalkulatif, dan hanya peduli pada usaha mendapatkan jabatan/kekuasaan (Back, 2005:2). Pendekatan ini menggunakan jumlah kursi dan atau jumlah partner kerjasama sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan koalisi. Pertimbangan bagi pembentukan koalisi dilakukan dengan menggunakan formula *Minimum Winning Coalition* (MWC). Secara sederhana, MWC didasarkan atas jumlah minimum yang diperlukan untuk mendapatkan mayoritas sederhana.

Formula MWC ini memiliki varian turunannya yang bermacam-macam seperti *Minimum Size Coalition* (MSC), *Minimum Number Coalition* (MNC), *Minimum Connected Winning Coalition*, *Bargaining Coalition* (BC) dan sebagainya. Dalam MSC misalnya, partai politik cenderung menghindari adanya kekuatan dominan yang berpotensi mengancam soliditas koalisi. Sedangkan MNC adalah pembentukan koalisi dengan mempertimbangkan jumlah minimum partai politik untuk dapat memenangkan dukungan parlemen. Jika MWC mempertimbangkan perolehan kursi, MNC mempertimbangkan jumlah partai yang bergabung.

Meskipun pandangan ini memiliki pijakan empiris untuk menjelaskan perilaku pembentukan koalisi lintas partai politik, pendekatan ini juga dikritik oleh generasi peneliti setelahnya yang menekankan partai politik bukan sebagai entitas tunggal tapi terfragmentasi dalam berbagai faksi. Fragmentasi dan faksionalisme internal ini mempengaruhi perilaku mereka dalam pembentukan koalisi dengan partai lainnya karena kedua hal ini berperan penting dalam proses *bargaining* atau tawar-menawar (Laver and Schofield, 1998:16). Oleh karenanya, pembentukan koalisi yang berhasil memerlukan kepemimpinan yang kuat dan atau partai dominan yang mampu memainkan diri sebagai penentu dan pengambil keputusan dalam koalisi.

Hal ini melahirkan pendekatan baru yang melihat partai sebagai *policy-seeking group*. Pendekatan *policy-seeking* berangkat dari pandangan bahwa partai politik bukan entitas yang semata peduli dengan pencarian kekuasaan. Sebaliknya, partai politik adalah juga institusi yang setia pada agenda ideologi tertentu dan berusaha untuk mempengaruhi dan atau mewujudkannya dalam kebijakan konkret. Dalam pendekatan ini, pembentukan koalisi bukan hanya ditentukan oleh jumlah mereka yang bergabung tapi juga agenda kebijakan macam apa yang ingin diwujudkan oleh partai politik. Dalam model ini, *portofolio allocation* menjadi hal yang menentukan bagi keberhasilan/kegagalan koalisi (Laver and Shepsle, 1990: 489-507). Alokasi portofolio menentukan orientasi kebijakan khusus yang disasar oleh sebuah partai politik. Pendekatan koalisi yang berorientasi pada kebijakan ini dilengkapi oleh pendekatan *veto player* yang menekankan pada peran penting formatur dalam pembentukan koalisi dan pemerintahan (Tsebelis and Ha, 2014: 336). Pendekatan *veto player* membantu memahami peran sentral yang dimainkan oleh orang kuat atau oligarki dalam pembentukan koalisi dan arah kebijakan/program partai politik di Indonesia (Budi, 2013: 51-66).

Meskipun kedua pendekatan ini dipakai untuk menjelaskan pembentukan koalisi dalam sistem parlementer di negara-negara Eropa, tapi kedua pendekatan ini memiliki pijakan empiris yang kuat untuk menjelaskan partai politik dan pembentukan koalisi di Indonesia dengan beberapa modifikasi. Salah satu modifikasi yang penting untuk dipertimbangkan adalah soal orientasi lain di luar hasrat pencarian kekuasaan dan menjaga garis kebijakan, seperti soal ideologi dan pragmatisme elit parpol di tingkat lokal.

Menurut kategorisasi lama, partai politik di Indonesia terdiri dari partai Islam, nasionalisme radikal, sosialisme-demokrat, tradisionalisme Jawa dan komunisme. (Feith

and Castles, 1970: 4). Kategorisasi ideologis ini dipakai untuk menjelaskan kecenderungan pembentukan koalisi berbasis politik aliran yang berlangsung antara 1945 dan 1965. Namun, penghancuran sistematis kekuatan atas kekuatan kiri oleh rezim Orde Baru membuat pengelompokan ideologis lama ini tidak lagi sepenuhnya memuaskan untuk menjelaskan orientasi partai politik di Indonesia pasca Orde Baru.

Berdasarkan kerangka yang dipakai Daniel Dhakidae, pengelompokan ideologis partai politik di Indonesia dapat ditarik dari dua kutub yang saling berlawanan yaitu sekuler-Islam dan kerakyatan-pro pasar (Sugiono dan Mas'udi, 2008: 21). Sementara itu, Pratikno (2007: 430) menggunakan kategori populis-elitis untuk melengkapi kategori Sekuler/Barat-Islamis sebagai basis ideologis partai politik kontemporer di Indonesia. Menggabungkan kedua skema itu, orientasi ideologis partai politik di Indonesia, penggunaan kategori sekuler dan Islam masih tetap relevan digunakan, sedangkan Jawa dan luar Jawa tidak lagi relevan sebagai dasar pengelompokan basis kepartaian. Sebagai gantinya, orientasi kebijakan antara yang elitis dan pro pasar dan populis proteksionis melengkapi kategorisasi partai politik di Indonesia.

Namun demikian, skema inipun kadang juga tidak mampu menjelaskan pengelompokan ideologis partai politik di Indonesia. Lay (2007: 71) misalnya menyatakan bahwa Pilkada langsung dan pembentukan koalisi lintas partai di Indonesia seringkali tidak mengikuti pola baku pengelompokan ideologis. Pratikno juga menyatakan bahwa era Pilkada langsung membuat partai politik seringkali mengenyampingkan pertimbangan ideologis dan mengedepankan pertimbangan pragmatis seperti uang dan kekuasaan sebagai dasar pembentukan koalisi (Pratikno, 2007: 431). Berdasarkan pengamatannya atas pelaksanaan Pilkada di Gowa, Buehler dan Tan bahkan menggunakan bahasa agak sarkastik berikut:

"...[Political parties] were guaranteed a role in the regional elections due to legal requirements, but in reality they became merely subcontractors of campaign work, charging their wealthy candidates for their nominations and campaign services. Candidate-party pairings were made on the basis of personal relationships, as well as financial and legal considerations, and represent an ad hoc approach antithetical to institutionalization" (2007:45)

Orientasi ideologi menyangkut identitas kolektif, *platform*, dan rumusan program partai politik dalam mendefinisikan relasi negara dan agama, sedangkan pragmatisme terkait erat dengan kecenderungan sikap dan perilaku politik aktual dan konkret yang ditunjukkan oleh elit dan atau aktivis partai politik yang cenderung tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan orientasi ideologis partai politik dimana mereka bernaung. Pudarnya orientasi ideologis dan menguatnya kecenderungan pragmatisme dipicu oleh banyak faktor seperti lemahnya pelembagaan dan rendahnya disiplin partai, biaya politik yang tinggi, politik uang (*money politics*), rendahnya identitas kepartaian di kalangan konstituen, dan menguatnya tuntutan populisme di media dan pemilih.

Terlepas dari pijakan empiris temuan baru tentang pola pembentukan koalisi dalam

Pilkada di Indonesia, penulis memandang bahwa orientasi ideologis dan pragmatisme elit masih tetap relevan sebagai pertimbangan dalam pembentukan koalisi. Meskipun sekarang dipandang sebagai era akhir ideologi, identitas ideologi pada tingkat tertentu masih melekat dan bahkan menentukan gerak langkah partai politik di Indonesia. PDIP dan PKB adalah dua contoh menarik bagaimana identitas ideologis lama tetap menjadi daya tarik untuk menggaet dukungan suara.

Terlepas dari inisiatif untuk mendekatkan diri dengan kalangan Islam lewat pembentukan Baitul Muslimin Indonesia (BMI) misalnya, pembentukan identitas baru ini tidak berjalan di level bawah. Sementara di kalangan PKB, Pemilu 2014 menunjukkan bagaimana partai ini mampu mengkonsolidasikan kembali basis sosial tradisionalnya di kalangan pesantren atau Nahdliyyin. Sementara itu, lemahnya pelembagaan partai di tingkat lokal membuat dominasi dan patronase di internal partai politik sangat kuat untuk melanggengkan pola perilaku pragmatis di kalangan parpol dan penentuan koalisi. Rekomendasi pimpinan partai tingkat nasional bagi pembentukan koalisi di daerah selama Pilkada menunjukkan bahwa identitas ideologis seringkali dieksploitasi untuk membungkus kepentingan pragmatis sesaat.

Dari model pembentukan koalisi seperti dikemukakan Laver dan Back serta

Tabel 1.
Tipologi Koalisi Partai Politik

Orientasi Kebijakan	Ukuran Anggota	
	Kecil	Besar
Ideologis	- Gabungan suara <30% dan atau partai pendukung ≤3 - Satu garis dalam identitas ideologis dan atau orientasi kebijakan - Satu partai dominan sebagai pemimpin koalisi	- Gabungan suara >30% kursi dan atau partai pendukung >3 - Satu garis dalam identitas ideologis dan atau orientasi kebijakan - Satu partai dominan sebagai pemimpin koalisi
Pragmatik	- Gabungan suara <30% dan atau partai pendukung ≤3 - Lintas ideologi dan orientasi kebijakan - Tidak ada partai dominan - Adanya figur kuat struktural/non struktural partai sebagai sponsor/penyanggah dana	- Gabungan suara >30% kursi dan atau parpol - Lintas ideologi dan orientasi kebijakan - Tidak ada partai yang dominan - Figur kuat non struktural partai sebagai sponsor/penyanggah dana

mempertimbangkan pengelompokan ideologis dan kecenderungan perilaku parpol dalam pembentukan koalisi di era pemilihan langsung di Indonesia, ada beberapa hal yang bisa diambil untuk menjelaskan tipologi atau model pembentukan koalisi lintas partai dalam Pilkada di Indonesia. Tipologi ini didasarkan atas dua hal yaitu ukuran atau keanggotaan dan orientasinya atas kekuasaan. Dilihat dari sisi ukuran atau keanggotaan, koalisi terdiri dari koalisi kecil dan besar, sedangkan dilihat dari sisi orientasi atas kekuasaan, partai politik di Indonesia terbagi dalam kategori partai ideologis dan pragmatis. Dari skema ini kita memiliki empat tipe pembentukan koalisi yaitu koalisi kecil-ideologis, koalisi kecil pragmatis, koalisi besar-ideologis dan koalisi besar-pragmatis.

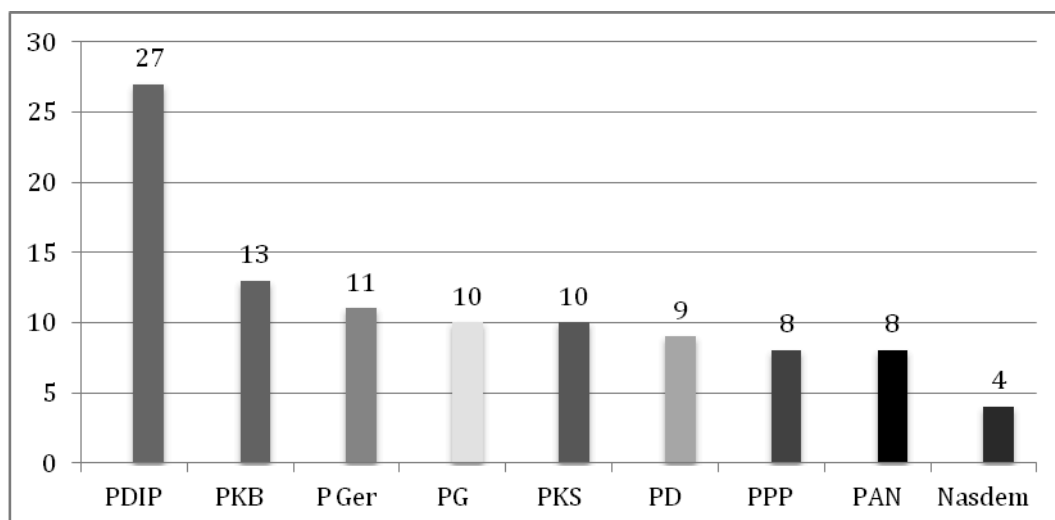
Peta Politik dan Hasil Pilkada Serentak 2015

Jawa Tengah telah lama dikenal sebagai daerah basis kelompok nasionalis. Pada saat penyelenggaraan pemilu pertama tahun 1955, PNI menduduki posisi puncak sebagai pemenang pemilu. Mengecualikan pemilu selama Orde Baru yang penuh rekayasa dan

kecurangan, PDIP yang menjadi penerus PNI di era sebelumnya kembali menjadi partai pemenang di provinsi ini. Sejak pelaksanaan pemilu demokratis tahun 1999, PDIP selalu konsisten menjadi jawara di Jawa Tengah. Beberapa daerah yang menjadi basis utama PDIP adalah eks Karesidenan Surakarta (Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Karanganyar), Kedu (Salatiga, Magelang, Kebumen, Temanggung) dan Banyumas (Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara). Kekuatan PDIP di Jawa Tengah relatif merata di 35 kabupaten/kota dengan pengecualian beberapa kabupaten/kota seperti Pekalongan dan Wonosobo yang merupakan basis PKB, Rembang sebagai basis PPP dan Purworejo yang menjadi basis Partai Demokrat/ Golkar.

Perolehan suara dan kursi PDIP sejak pemilu 1999 sampai 2014 memungkinkan mereka mendapatkan posisi-posisi strategis baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Pada pemilu legislatif 2014, PDIP mendapatkan 27 persen suara atau setara dengan 27 kursi dari total 100 kursi anggota DPRD Jawa Tengah. Jumlah ini lebih dari dua sampai tujuh kali lipat perolehan partai-partai pesaing seperti

Tabel 2.
Perolehan Kursi Legislatif Provinsi Pemilu 2014



Sumber: Diolah dari data KPU

PKB (13), Gerindra (11), Golkar (10), PKS (10), Demokrat (9), PPP (8), PAN (8), dan Nasdem (4). Perolehan kursi ini sebanding dengan posisi yang PDIP dapatkan di lembaga legislatif tingkat kabupaten/kota. Sejak akhir 1990-an, kader PDIP mendapatkan posisi sebagai ketua DPRD tingkat provinsi dan mendapatkan mayoritas posisi ketua DPRD di level kabupaten/kota.

Perolehan kursi di DPRD tingkat provinsi ini tidak berbeda jauh dengan persentase dengan total perolehan kursi partai di DPRD tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2015. Dari total 940 kursi DPRD di 21 kabupaten/kota, lima besar partai politik pengumpul suara terbanyak adalah PDIP (250 kursi), PG (129 kursi), PKB (107 kursi), Gerindra (104 kursi), dan PKS (80 kursi). PDIP konsisten menjadi pemenang di sebagian besar kabupaten/kota dengan perolehan kursi tertinggi di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo,

dan Kota Surakarta. PDIP hanya kalah di Kabupaten Rembang yang menjadi basis utama PPP. Sementara itu, Hanura yang tidak mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki total 31 kursi yang tersebar di 15 dari 21 kabupaten/kota penyelenggara Pilkada serentak.

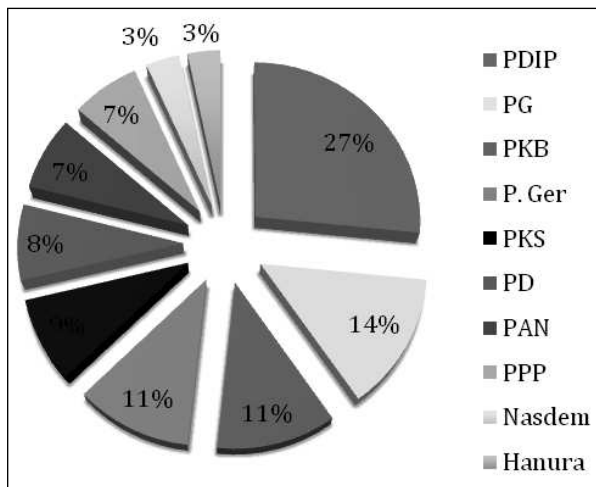
Berdasarkan ideologinya, nasionalis-sekuler adalah orientasi ideologis dominan partai politik di 21 kabupaten/kota. Dalam kategori ini adalah partai-partai seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem dan Hanura. Sedangkan partai-partai berorientasi Islam seperti PKS, PPP, PKB dan PAN relatif lebih kecil perolehan kursinya. Perolehan kursi ini makin kecil pengaruhnya sebagai blok politik karena fragmentasi ideologis yang cukup lebar antara mereka yang terbuka mengadopsi ideologi Islam seperti PKS dan PPP dan PAN dan PKB yang menerima Pancasila sebagai dasar ideologinya. Kecuali Nasdem dan Hanura,

Tabel 3.
Perolehan Kursi DPRD dalam Pemilu 2014

No	Kabupaten/ Kota	PARTAI POLITIK										Total
		PDIP	PG	PKB	Ger	PD	PKS	PPP	PAN	Nas	Han	
1	Boyolali	25	6	2	4	1	4		3			45
2	Demak	8	9	9	8	2	4	5	2	3		50
3	Grobogan	12	6	7	5	4	3	4	2	4	3	50
4	Klaten	17	8	3	5	2	5	2	5	1	2	50
5	Purbalingga	11	7	5	6	2	5	2	4	1	2	45
6	Semarang	11	5	5	5	4	5	3	3		4	45
7	Sukoharjo	22	5	3	5	2	1		5	2		45
8	Wonogiri	13	10	1	4	4	6	2	4	1		45
9	Pemalang	13	7	7	7		5	6	3		2	50
10	Kebumen	9	5	6	7	4	3	3	7	5	1	50
11	Blora	6	8	5	4	8	5	5		3	1	45
12	Pekalongan	11	5	12	5	2	1	4	4		1	45
13	Purworejo	8	7	6	6	6	4	2	1	2	3	45
14	Wonosobo	9	4	8	4	4	1	4	3	4	4	45
15	Kendal	9	4	6	4	3	4	5	7	1	2	45
16	Sragen	11	8	7	5	3	6	1	3		1	45
17	Rembang	5	3	6	5	8	1	10	2	3	2	45
18	Kota Magelang	7	4	2	2	3	3		1	1	2	25
19	Kota Semarang	15	5	4	7	6	6	2	4	1		50
20	Kota Pekalongan	4	9	3	3	1	3	4	3			30
21	Kota Surakarta	24	4		3	3	5	1	4		1	45
Total		250	129	107	104	72	80	65	70	32	31	940

Sumber: Diolah dari data KPU

Bagan 1.
Prosentase Perolehan Kursi Legislatif
tingkat Kabupaten/Kota



Sumber: Diolah dari data KPU

dilihat dari peta sebarannya, partai berorientasi nasionalis-sekuler memiliki perwakilan di semua kabupaten/kota. Sedangkan partai berorientasi Islam, hanya PAN dan PKS yang memiliki persebaran merata di semua 21 kabupaten/kota. PKB tidak memiliki kursi di Kota Surakarta dan PPP tidak memiliki perwakilan di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo dan Kota Magelang.

Pemilih tetap dalam Pilkada serentak berjumlah 15.242.847 dengan komposisi yang hampir setara antara pemilih pria dan wanita. Jumlah pemilih terbanyak ada di Kota Semarang sebanyak 1.211.170 orang sedangkan jumlah pemilih paling sedikit berada di Kota Magelang yaitu sejumlah 96.731 orang. Dari jumlah pemilih lebih dari 15 juta orang tersebut, ada beberapa detail menarik terkait pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan pemilih senior dengan usia lebih dari 90 tahun. Kabupaten Sragen memiliki jumlah pemilih penyandang disabilitas terbesar dengan jumlah 11.735 orang. Jumlah ini setara dengan 47 persen dari total 24.786 penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih di Jawa Tengah. Sementara itu, Kabupaten Klaten mencatat jumlah pemilih usia lanjut (lebih dari 90 tahun)

terbanyak dengan 6.535 orang. Pilkada serentak 2015 juga diikuti oleh pemilih pemula yang cukup banyak. Dari jumlah pemilih pemula sebanyak 176.584 orang, jumlah terbesar berada di Kabupaten Pemalang yaitu sebanyak 24.134 sedangkan Kota Magelang memiliki jumlah pemilih pemula paling sedikit, yaitu hanya 1.403 orang.

Jika dilihat dari sisi partisipasi, penyelenggaraan Pilkada serentak terbilang sukses karena relatif tingginya tingkat partisipasi yang mencapai angka rata-rata 68,9 persen. Dari rata-rata partisipasi pemilih itu, Boyolali, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan mencatat angka partisipasi pemilih terbesar dengan angka masing-masing 79 persen, 75 persen dan 74 persen. Sedangkan tiga besar daerah dengan tingkat partisipasi pemilih terendah adalah Pemalang 60,06 persen, Purbalingga 60,35 persen, dan Purworejo 61,90 persen. Dilihat dari perolehan suara pemenang, pasangan kandidat Wardoyo Wijaya-Purwadi yang diusung oleh PDIP untuk Pilkada di Kabupaten Sukoharjo mencatat perolehan suara tertinggi dengan angka 85 persen, sedangkan pasangan yang diusung koalisi Gerindra dan PKS untuk posisi Bupati Sragen (Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Dedy Endriyatno) mencatat perolehan suara terendah yaitu 40,60 persen.

Pilkada serentak 2015 di Jawa Tengah diikuti oleh 56 pasang calon. Dari 56 pasang calon ini, 18 diantaranya adalah pasangan calon petahana yaitu mereka yang sedang menjabat, baik sebagai bupati/wakil bupati maupun walikota/wakil walikota, sedangkan 38 pasang lainnya adalah calon baru. Dari 16 pasangan calon petahana, 12 di antaranya berhasil memenangkan kembali pertarungan, sedangkan enam pasangan lain kalah dari calon pendatang baru. Empat bakal calon maju melalui jalur perseorangan, sedangkan 52 pasangan bakal calon lainnya maju diusung oleh satu partai dan atau melalui koalisi lintas partai.

Pilkada 2015 di Jawa Tengah juga berhasil memunculkan 8 kandidat perempuan menjadi pemenang baik dalam posisi sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kabupaten Grobogan, Kendal, Klaten dan Sragen adalah daerah bakal calon perempuan yang mampu mengalahkan bakal calon laki-laki. Sedangkan Kota Magelang dan Semarang serta Kabupaten Purbalingga, Purworejo, Klaten dan Pekalongan adalah daerah yang berhasil dimenangkan oleh bakal calon perempuan. Kabupaten Klaten menjadi satu-satunya daerah dimana pasangan kandidat yang sama-sama perempuan memenangkan Pilkada.

Dari sembilan daerah dimana kandidat yang diusung oleh PDIP memenangkan pertarungan, PDIP membangun koalisi bukan saja dengan partai nasionalis sekuler tapi juga partai berorientasi Islam. Ini terjadi di Kabupaten Demak, Grobogan, Purbalingga,

Semarang dan Kota Pekalongan. Di kelima kabupaten/kota ini, PDIP membangun koalisi dengan partai-partai berorientasi Islam seperti PAN, PKB, PKS, dan PPP. Salah satu langkah yang menarik dilakukan PDIP di Pilkada Demak adalah PDIP hanya mendukung calon yang diusung Golkar dan PPP, Muhammad Natsir-Joko Sutanto, mengalahkan calon petahana, Dachirin Said-Edi Sayuti, yang diusung PKB dan Nasdem.

Pilkada di Kabupaten Pekalongan mungkin menjadi yang paling dramatis karena ketatnya selisih suara dari dua pasang calon. Kandidat yang diusung PKB tanpa koalisi dengan partai lainnya, Asip Kholbihi dan Arini Harimurti berhasil mengungguli jago yang diusung PDIP. Kemenangan Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto atas lawan-lawannya dalam Pilkada di Rembang juga layak dicatat. Pasangan yang maju lewat jalur perseorangan

Tabel 4.
Daftar Pemenang Pilkada Jateng 2015

No	Kabupaten/Kota	Pasangan Calon	Suara (%)	Pemenang
1	Sukoharjo	2	85,20	Wardoyo Wijaya-Purwadi
2	Boyolali	2	69,67	Seno Samudra-Said Hidayat
3	Kota Surakarta	2	60,39	Hadi Rudyatmo-Acmad Purnomo
4	Pemalang	3	52,81	Djunaidi-Martono
5	Rembang	3	68,53	Abdul Hafidz-Bayu Andrianto
		1 independen		
6	Wonogiri	2	54,47	Joko Sutopo-Edy Santosa
7	Klaten	3	48,98	Sri Hartini-Sri Mulyani
8	Kota Magelang	3	48,61	Sigit Windyonindito-Windarti Agustina
		1 independen		
9	Kota Pekalongan	3	46,70	Alf Arslan Djunaid-Saelani Mahfud
10	Sragen	4	40,60	Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Dedy Endriyatno
11	Semarang	2	65	Mundjirin-Ngesti Nugraha
12	Demak	3	54,21	M. Natsir-Joko Sutanto
13	Kota Semarang	3	46,32	Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu
14	Grobogan	2	73,06	Sri Sumarni-Edi Maryono
15	Kendal	2	62,23	Mirna Annisa-Masrur Masykur
16	Kebumen	3	51,13	M. Yahya Fuad-Yazid Mahfudz
17	Pekalongan	2	50,30	Asip Kholbihi-Arini Harimurti
18	Purworejo	3	49,69	Agus Bastian-Yuli Hastuti
19	Wonosobo	4	46,81	Eko Purnomo-Agus Subagio
		1 independen		
20	Purbalingga	2	54,49	Tasdi-Dyah Hayuning Pratiwi
21	Blora	3	51,06	Djoko Nugroho-Arif Rohman

Sumber: Diolah dari data KPU

ini unggul jauh atas lawannya yang diusung koalisi partai politik. Meskipun maju lewat jalur perseorangan, Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto sebenarnya tidak sepenuhnya lepas dari afiliasi partai. Abdul Hafidz adalah kader PPP dan mantan Pelaksana Tugas Bupati Rembang, sedangkan Bayu adalah kader Partai Nasdem. Konflik internal DPP PPP dan kecilnya suara Nasdem di DPRD Rembang membuat kedua partai ini tidak memenuhi persyaratan administratif untuk mengajukan calonnya sendiri. Hal ini mendorong keduanya terpaksa memilih jalur perseorangan dengan tetap mengandalkan mesin partai. Kemenangan ini membuktikan bahwa Rembang tetap merupakan basis terkuat PPP di Jawa Tengah bagian utara karena partai ini menempatkan 10 kadernya dalam DPRD Kabupaten pada Pemilu Legislatif 2014.

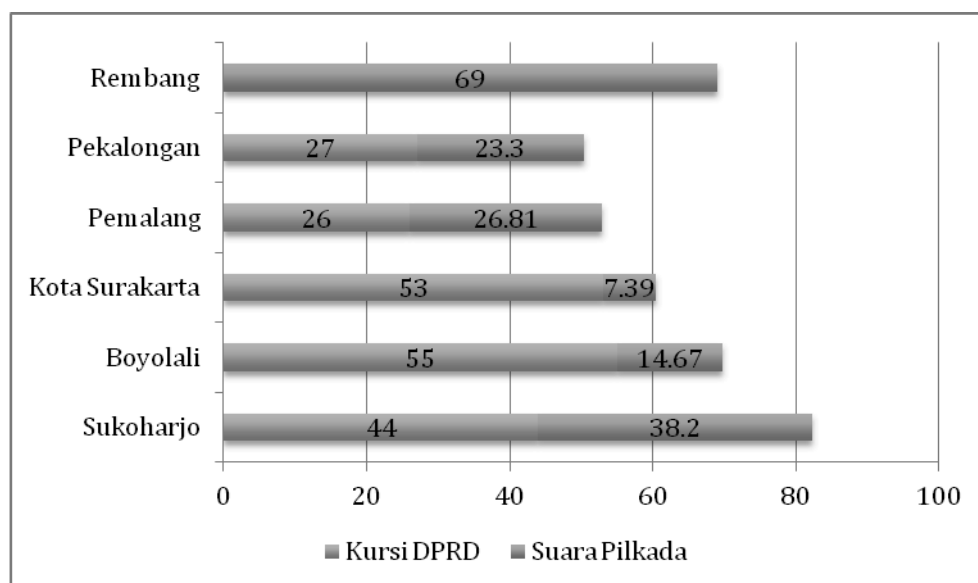
Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Jateng 2015

Pembentukan koalisi lintas partai politik menjadi ciri dominan dari penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah. Dari 21 kabupaten/kota yang menyelenggarakan

Pilkada, terdapat 15 kabupaten/kota dimana kandidat yang maju dan menang berasal dari hasil koalisi lintas partai politik dan hanya 5 daerah yang pemenangnya murni diajukan oleh satu partai yaitu, PDIP (Solo, Boyolali, Sukoharjo, dan Pemalang) dan PKB (Kabupaten Pekalongan), serta satu daerah (Rembang) yang pemenangnya berasal dari calon perseorangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan koalisi menjadi aspek yang penting yang tidak bisa diabaikan dalam Pilkada seperti halnya aspek-aspek lain seperti penyelenggaraan, mobilisasi pendukung dan kampanye massa, dan pendanaan.

Tabel 5 menampilkan daerah-daerah dimana kandidat yang menang dalam Pilkada diusung oleh satu partai tanpa membangun koalisi. Dari lima daerah ini, kandidat yang diusung oleh PDIP menang di empat kabupaten/kota yaitu Sukoharjo, Boyolali, Kota Surakarta dan Pemalang. Perolehan suara kandidat yang diusung PDIP di Sukoharjo adalah salah satu yang tertinggi bukan saja di Jawa Tengah tapi juga di Indonesia dengan perolehan suara lebih dari 80 persen. Perolehan suara kandidat PDIP untuk posisi Walikota Surakarta juga tinggi

Tabel 5.
Perolehan Suara Partai Non Koalisi



Sumber: Diolah dari data KPU

dengan angka sekitar 60 persen. Sementara itu di Kabupaten Pekalongan, kandidat yang diusung tunggal oleh PKB (Asip Kholbihi dan Arini Harimurti) menang tipis dengan selisih suara sekitar 2.000 orang dari kandidat yang diusung PDIP (Riswadi dan Nurbalistik). Rendahnya selisih suara ini mendorong terjadinya sengketa di MK untuk menggugat hasil perhitungan KPU setempat.

Pembentukan koalisi dalam Pilkada serentak di Jawa Tengah tahun 2015 menunjukkan bahwa skema pengelompokan ideologis dan politik aliran lama seperti yang dipakai Feith dan Castles tidak sepenuhnya relevan karena tidak ada pola baku pembentukan koalisi atas dasar kesamaan ideologis. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa tidak ada satupun dari 15 kabupaten/kota yang menggunakan model Koalisi Besar Ideologis (KBI) sebagai pilihan dalam pembentukan koalisi. Hal ini juga mengafirmasi banyak temuan riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa pertimbangan ideologi memang semakin terpinggirkan dalam pembentukan koalisi politik lintas partai di Indonesia pasca reformasi.

Koalisi Besar Pragmatis (KBP) menjadi tipe koalisi yang paling umum dibangun dalam Pilkada serentak di Jawa Tengah. Model KBP diadopsi dari sembilan daerah, yaitu Purbalingga, Kendal, Blora, Kebumen, Purworejo, Grobogan, Demak, Semarang

dan Kota Semarang. Sedangkan Koalisi Kecil Ideologis (KKI) terjadi di empat daerah yaitu Kota Magelang, Kota Pekalongan, Klaten dan Wonogiri. Lain halnya dengan Koalisi Kecil Pragmatis (KKP) terjadi di dua daerah yaitu Kabupaten Wonosobo dan Sragen. Dari sembilan daerah yang menggunakan pola KBP dalam pembentukan koalisi, PDIP mampu menang di lima daerah yaitu Purbalingga, Semarang, Demak, Grobogan dan Kota Semarang. Sedangkan di empat daerah lainnya PDIP mengalami kekalahan yaitu di Blora, Purworejo, Kebumen dan Kendal. Itupun dengan catatan bahwa di Pilkada Demak, PDIP hanya sebagai pendukung, bukan partai yang sejak semula mengajukan calon kandidat pemenang. Sedangkan untuk daerah yang menggunakan model KKI, seluruhnya dimenangkan PDIP dan dua daerah sisanya yang menggunakan model KKP, semuanya dimenangkan oleh kandidat non PDIP.

Dibandingkan dengan daerah lainnya, koalisi yang digawangi PDIP di Purbalingga mungkin menjadi koalisi yang paling menarik karena berhasil mengumpulkan lebih dari separo jumlah kursi di DPRD. Koalisi yang mengusung kandidat Tasdi (Wakil Bupati petahana) dan Dyah Hayuning Pratiwi mampu mengumpulkan PDIP dalam satu gerbong koalisi bersama Gerindra, PKS, PAN, dan Nasdem. Meskipun memiliki modal kursi dan perolehan

Tabel 6.
Pengelompokan Koalisi Besar-Pragmatis Pilkada Jateng 2015

NO	Kabupaten/Kota	Partai Politik									
		PDIP	PG	PKB	PGer	PD	PKS	PPP	PAN	Nas	Han
1	Purbalingga	M	K	K	M	K	M	K	M	M	K
2	Semarang	M	K	K	M	K	K	K	M		K
3	Kota Semarang	M	K	K	K	M	K	K	K	M	
4	Grobogan	M	K	M	K	K	K	K	M	K	M
5	Demak	M	M	K	K	K	K	M	K	K	
6	Kendal	K	K	K	M	K	M	K	M	K	M
7	Kebumen	K	K	M	M	M	K	M	M	K	1
8	Blora	K	K	M	K	K	M	M		M	M
9	Purworejo	K	M	K	K	M	M	K	K	K	M

Keterangan: M = menang, K = kalah

Sumber: Diolah dari data KPU

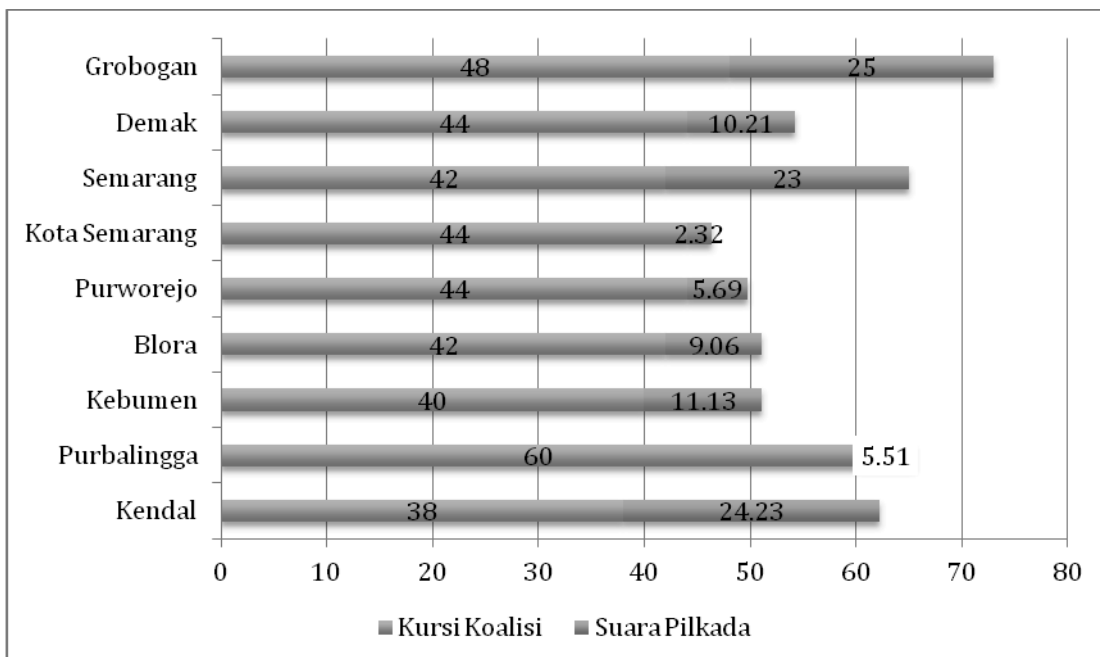
suara dominan 60 persen, menariknya pasangan ini justru hanya mendapatkan suara sekitar 54 persen dengan angka partisipasi pemilih adalah salah satu yang paling rendah di Jawa Tengah. Yang terjadi di Purbalingga bertolak belakang dengan kemenangan yang diperoleh PDIP dalam Pilkada di Grobogan. Koalisi besar yang dibangunnya bersama PKB, PAN dan Hanura mampu mengantarkan kader PDIP mengalahkan calon petahana yang diusung koalisi Golkar, Gerindra dan Nasdem.

Sementara itu di Kabupaten Semarang, koalisi yang dibangun PDIP bersama Demokrat dan Nasdem juga berhasil memenangkan pertarungan. Hal serupa juga terjadi di Kota Semarang. Kemenangan di dua daerah ini mencerminkan langkah politik yang pragmatis karena PDIP adalah partai dominan dengan perolehan suara lebih dari 20 persen di DPRD, jumlah kursi yang lebih dari cukup untuk modal kemenangan tanpa harus membangun koalisi besar dengan partai lainnya.

Kekalahan koalisi yang dibangun PDIP bersama PKB dan Nasdem di Kabupaten Kendal

meninggalkan beberapa catatan menarik. Hal ini dikarenakan kandidat PDIP yang juga bupati petahana yaitu Widya Kandi Susanti, yang diharapkan akan memenangkan pertarungan justru kalah telak dari penantanginya. Terlepas dari kegagalan membangun koalisi yang solid dengan PKB dan Nasdem, kinerja Widya Kandi Susanti sebagai petahana yang rendah jelas berpengaruh bagi kekalahan koalisi ini. Selama beberapa tahun, Widya Kandi Susanti dan dominasi keluarganya dalam politik dan bisnis di Kendal memang menjadi sumber ketidakpuasan luas di masyarakat. Ini menjelaskan bahwa pencalonan kembali sang petahana sejak awal telah menjadi titik lemah (*liability*) bagi PDIP. Kelemahan ini dimanfaatkan dengan baik oleh koalisi partai pendukung Mirna Annisa dan Masrur Masykur untuk menggalang dukungan masyarakat. Koalisi besar yang diusung PAN, PKS, Gerindra, dan Hanura berhasil mengkonversi suara kolektif mereka yaitu 36 persen menjadi modal kemenangan. Kemenangan lebih dari 60 persen yang diraih pasangan ini menunjukkan

Tabel 7.
Perolehan Suara Pemenang Koalisi Besar-Pragmatis



Sumber: Diolah dari data KPU

koalisi besar pendukungnya solid dan mampu memobilisasi masa.

Sementara itu dalam Pilkada di Purworejo, pasangan yang diusung koalisi Demokrat, Golkar, Hanura dan PKS yaitu Agus Bastian dan Yuli Astuti berhasil mengungguli pasangan Hamdan Azhari dan Suhar yang diusung koalisi Gerindra, Nasdem dan PAN serta pasangan Nurul Triwahyuni dan Budi Sunaryo yang diusung koalisi PDIP dan PKB. Hasil Pilkada ini mengukuhkan Purworejo sebagai daerah nonbasis PDIP di Jawa Tengah.

Pilkada Kebumen juga menarik karena mampu mengantarkan pasangan Yahya Fuad dan Yazid Mahfudz yang diusung koalisi besar partai politik menjadi pemenang. Disamping disokong mesin partai PAN, PKB, Demokrat dan Gerindra, pasangan pemenang ini juga mendapat sokongan penuh dari dua Ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU. Hal ini tidak lepas dari latar belakang Yahya Fuad sebagai kader Muhammadiyah dan Yazid Mahfudz sebagai kader NU Kebumen. Tambahan dukungan dari Gerindra dan Demokrat membuat kemenangan pasangan ini makin tidak terbendung. Hasil ini menjadi pukulan cukup telak bagi PDIP Kebumen yang pernah menjadi jawara dalam beberapa Pilkada sebelumnya. Kebumen yang pernah menjadi basis terkuat PDIP di Jawa Tengah mulai beralih menjadi daerah tanpa partai dominan.

Hal serupa juga terjadi di Blora, pasangan yang diusung koalisi besar PKB, PPP, PKS, Nasdem dan Hanura yaitu Djoko Nugroho

dan Arif Rohman memenangkan Pilkada. Kemenangan pasangan Djoko Nugroho dan Arif Rohman dalam Pilkada Blora menunjukkan relatif solidnya koalisi besar pragmatis dalam mendukung kandidat yang diusungnya untuk memenangkan Pilkada. Pilkada di Kabupaten Blora sudah diperkirakan dari awal bahwa calon dari PDIP tidak akan mampu berbicara banyak. Disamping perolehan suaranya yang tidak dominan, PDIP juga tidak memiliki kandidat kuat yang diusung untuk memenangkan pertarungan.

Berbeda dengan pembentukan KBP, PDIP justru memperoleh kemenangan di semua KKI dibangun selama Pilkada. Kemenangan PDIP di Wonogiri, Klaten, Kota Magelang dan Kota Pekalongan menunjukkan bahwa koalisi kecil dengan ikatan ideologis yang hampir serupa memiliki peran penting bagi kemenangan dalam Pilkada. Pembentukan koalisi kecil ideologis ini juga memungkinkan PDIP tetap mempertahankan posisinya sebagai partai dominan.

Meskipun Koalisi Besar Pragmatis (KBP) dan Koalisi Kecil Ideologis (KKI) adalah pilihan yang paling umum dalam pembentukan koalisi di Pilkada Jawa Tengah, pembentukan Koalisi Kecil Pragmatis juga mampu mengantarkan kepada kemenangan. Pilkada Wonosobo dan Sragen membuktikan bahwa Koalisi Kecil Pragmatis mampu melawan dominasi partai-partai besar atau dominan. Pilkada Wonosobo misalnya, memunculkan anak muda sebagai pemenang yaitu Bupati Eko Purnomo yang belum lagi genap berusia 40 tahun. Pasangan

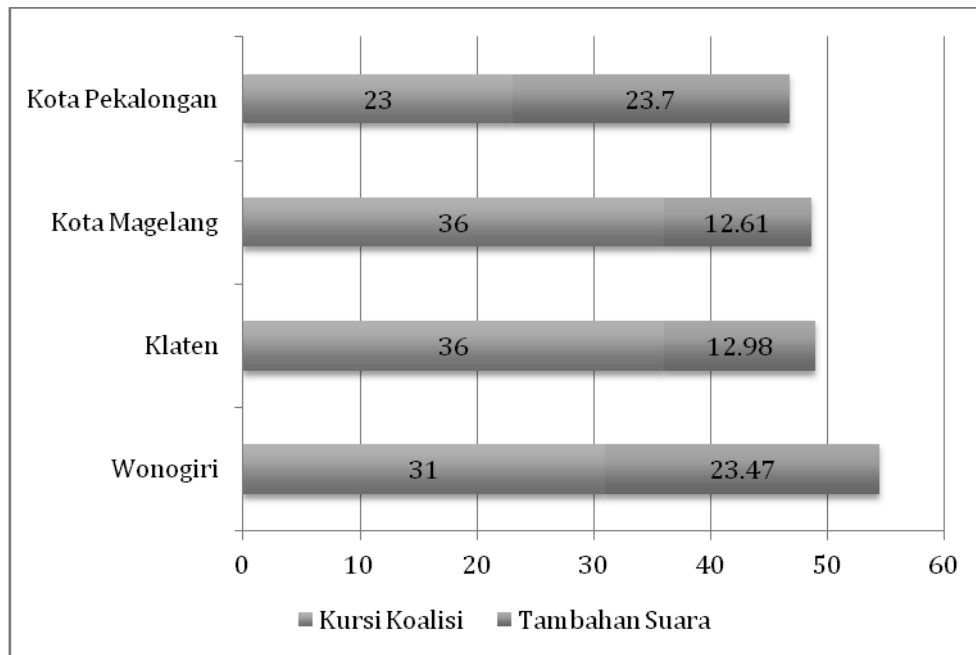
Tabel 8.
Pengelompokan Kecil-Ideologis Pilkada Jateng 2015

NO	Kabupaten/Kota	Partai Politik									
		PDIP	PG	PKB	PGer	PD	PKS	PPP	PAN	Nas	Han
1	Wonogiri	M	K	K	K	K	K	K	K	M	
2	Klaten	M	K	K	K	K	K	K	K	M	K
3	Kota Magelang	M	K	K	M	K	K		K	K	K
4	Kota Pekalongan	M	K	M	K	K	K	K	K		

Keterangan : M = Menang, K = Kalah

Sumber: Diolah dari data KPU

Tabel 9.
Perbandingan Kursi dan Perolehan Suara KKI



Sumber: Diolah dari data KPU

Tabel 10.
Pengelompokan Koalisi Kecil-Pragmatis Pilkada Jateng 2015

NO	Kabupaten/Kota	Partai Politik									
		PDIP	PG	PKB	PGer	PD	PKS	PPP	PAN	Nas	Han
1	Sragen	K	K	K	M	K	M	K	K		K
2	Wonosobo	K	K	K	K	K	M	M	K	K	M

M = Menang, K = Kalah

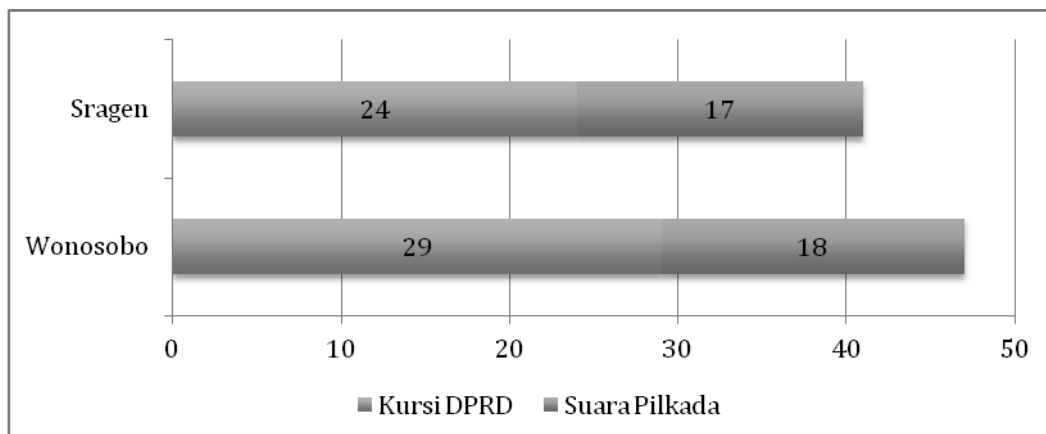
Sumber: Diolah dari data KPU

Eko Purnomo-Agus Subagyo adalah pasangan yang diusung koalisi Golkar, Hanura, dan PKS. Koalisi ini juga disokong oleh PPP yang tidak dapat bergabung secara formal dengan *partner* koalisi lain karena kendala legal-administratif. Kemenangan ini mengikis harapan kandidat kuat yang diusung koalisi PKB, PAN, Gerindra, dan Demokrat yaitu pasangan Syarif Abdullah dan Usup Sumanang. Meski kemenangannya digugat ke MK, pasangan Eko Purnomo dan Agus Subagyo akhirnya ditetapkan sebagai pemenang setelah MK menolak gugatan sengketa lawan politiknya.

Di Sragen, mantan kader PDIP, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, berhasil unggul atas

calon yang diusung PDIP yaitu Sugiyamto dan Joko Saptono. Kusdinar dan pasangannya, Dedi Endriyatno, yang diusung PKS dan Gerindra, berhasil mendapatkan 40,65 persen, sedangkan pasangan Sugiyamto hanya mendapatkan 13,16 persen suara. Hasil ini juga mengantarkan pasangan Kusdinar-Dedi mengalahkan bupati petahana yang maju kembali yaitu pasangan Agus Fathur Rahman dan Djoko Suprpto yang diusung koalisi Golkar dan Hanura. Kemenangan Kusdinar menjadi anti klimaks dari konflik internal di PDIP menyusul surat pemecatan kepadanya yang ditandantangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri dan Sekjen

Tabel 11.
Perbandingan Kursi dan Perolehan Suara KKP



Sumber: Diolah dari data KPU

Hasto Kristiyanto pada tanggal 1 Desember 2015, hanya seminggu sebelum pelaksanaan Pilkada.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini menunjukkan bahwa pembentukan koalisi adalah salah satu aspek penting dalam Pilkada di Jawa Tengah tahun 2015. Pilkada serentak di Jateng bulan Desember 2015 menunjukkan bahwa baik ideologi maupun pragmatisme memainkan peran yang sama pentingnya sebagai pertimbangan dalam pembentukan koalisi. Dari empat pola pembentukan koalisi, Koalisi Besar Pragmatis (KBP) menjadi pilihan yang paling umum dan ditempuh, sedangkan Koalisi Kecil Pragmatis (KKP) adalah yang paling jarang dipilih oleh partai politik untuk membentuk koalisi. Dari 21 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, hanya ada empat daerah dimana koalisi dibentuk atas dasar pengelompokan ideologis, sedangkan 11 daerah cenderung menampilkan pola koalisi yang lebih ditentukan oleh pertimbangan pragmatisme politik.

Faktor ideologi memainkan peran penting di daerah yang secara sosiologi politik relatif homogen dengan posisi satu partai yang dominan. Pilkada di Klaten, Wonogiri, Kota

Pekalongan dan Kota Magelang menunjukkan bahwa partai nasionalis mampu menjaga ikatan ideologis ini sebagai dasar pembentukan koalisi. Dominasi PDIP dalam perolehan kursi DPRD membuatnya mampu memainkan peran dominan dalam pembentukan koalisi dengan ikatan ideologis yang berdekatan seperti Gerindra dan Nasdem. Sedangkan pertimbangan pragmatis berpengaruh dalam pembentukan koalisi di daerah dimana fragmentasi internal elit partai dan fragmentasi politik lintas partai terlalu lebar untuk dipertemukan, disamping juga tidak ada partai dengan posisi dominan di lembaga legislatif lokal. Dari sebelas daerah, kasus Sragen adalah contoh menarik dimana fragmentasi internal elit PDIP membuatnya kalah dalam pertarungan Pilkada.

Meskipun peran rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai di Jakarta memainkan peran penting, tapi hal ini tidak bisa dilebih-lebihkan sebagai faktor penentu tunggal (*determinant factor*) karena kepemimpinan partai tingkat kabupaten/kota juga memiliki otonomi dan suara untuk turut menentukan dalam pembentukan koalisi. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa meskipun PDIP adalah partai dominan di Jawa Tengah, tapi PDIP tidak selalu dalam posisi menentukan dalam

pembentukan koalisi. Kemenangannya di sebagian besar daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak di Jawa Tengah adalah hasil dari kemampuan bermanuver aktivis partai di tingkat lokal, bukan saja untuk mencari partner koalisi yang kuat tapi juga kandidat yang memiliki tingkat popularitas dan keterpilihan yang tinggi. Namun demikian, pembentukan koalisi penting, faktor lain seperti dukungan pendanaan, strategi kampanye dan pengaruh media juga memainkan peran yang tidak kalah penting bagi kemenangan dalam Pilkada.

Namun demikian, tulisan ini belum mencakup pembahasan detail bagaimana dinamika pembentukan koalisi di setiap daerah itu terbentuk karena fokusnya pada usaha menjelaskan pola umum pembentukan koalisi yang terjadi di 21 daerah yang melaksanakan Pilkada di Jawa Tengah. Penjelasan detail tentang bagaimana pembentukan koalisi terjadi di setiap daerah oleh peneliti atau penulis lain akan memberikan penjelasan komprehensif tentang saling keterkaitan antara faktor ideologis dan pragmatis dalam pembentukan koalisi dan berpotensi memberikan sumbangan berharga bagi studi tentang koalisi secara khusus dan kajian tentang politik lokal dan kepartaian di Indonesia pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Axelrod, Rober. (1970). *Conflict of Interest*. Chicago: Markham.
- Back, Hanna. (2005). Intraparty Politics and Coalition Formation: Evidence from Swedish Local Government. *Paper presented at the ECPR Joint Session, Granada, 14-19 April 2005*.
- Budi, Arya. (2013). Membongkar Veto Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 17 No. 1, hlm. 51-66.
- Buehler, Michael. (2009). The Rising Importance of Personal Networks in Indonesian Local Politics. In Priyambudi Sulistiyanto and Maribeth Erb (eds). *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS, pp. 101-124.
- Buehler, Michael and Paige Johnston Tan. (2007). Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province. *Indonesia* 84: 41-69.
- Choi, Nankyung. (2009). Batam's 2006 Mayoral Election: Weakened Political Parties and Intensified Power Struggle in Local Indonesia. In Priyambudi Sulistiyanto and Maribeth Erb (eds). *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS, pp. 74-100.
- Geys, Benny et.al. (2006). Explaining the Formation of Minimal Coalitions: Anti System-Parties and Anti-Pact Rules. *European Journal of Political Research*. Vol. 45, pp. 957-984.
- Hidayat, Syarif. (2009). Pilkada, Money Politics and the Dangers of "Informal Governance" Practices. In Priyambudi Sulistiyanto and Maribeth Erb (eds). *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS, pp. 125-146.
- Hill, David T. (2009). Assessing Media Impact on Local Election in Indonesia. In Priyambudi Sulistiyanto and Maribeth Erb (eds). *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS, pp. 229-258.
- Feith, Herbert, dan Lance Castles, (1970). *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca and London: Cornell University.
- Fionna, Ulla. (2013). *The Institutionalisation of Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia: From the Grass-Root Up*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Tan, Paige Johnston. (2008). Indonesia Seven Years After Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy. *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 28 No. 1, p. 88-114.
- Kenawas, Yoes Chandra. (2013). The Rise of Political Dynasties in Decentralized

- Indonesia. *Master Thesis*. Singapore: Nanyang Technological University.
- Laver, Michael. (1998). Models of Government Formation. *Annual Review of Political Science*. Vol. 1, pp. 1-25.
- Laver, Michael and Kenneth A. Shepsle. (1990). Government Coalitions and Intraparty Politics. *British Journal of Political Science*. Vol. 20 No. 4, pp. 489-507.
- Laver, Michael. (1989). "Theories of Coalition Formation and Local Government. In Colin Mellors and Bert Pijnenburg (eds). *Political Parties and Coalitions in European Local Government*. London: Routledge.
- Lay, Cornelis. (2007). Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 11 No. 1, 63-92.
- Mietzner, Marcus. (2008). Political Opinion Polling in Post-Authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation?. *Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde*. Vol. 165 No. 1:95-126.
- Neumann, John von and Oskar Morgenstern. (1953). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton: Princeton University Press.
- Pratikno. (2009). Political Parties in Pilkada: Some Problem for Democratic Consolidation. In Priyambudi Sulistiyanto and Maribeth Erb. *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS, pp. 53-73.
- _____. (2007). Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 10 No. 3, 415-438
- Riker, William. (1962). *The Theory of Political Coalitions*. New Haven: Yale University Press
- Skjaeveland, Asbjorn, et.al. (2007). Theories of Coalition Formation: An Empirical Test Using Data From Danish Local Government. *European Journal of Political Research*. Vol. 46
- Sugiono, Muhadi dan Wawan Mas'udi, (2008). Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009. *Laporan Penelitian Hibah Riset Fakultas*. Yogyakarta: FISIPOL UGM
- Tomsa, Dirk. (2014). Party System Fragmentation in Indonesia: The Subnational Dimension. *Journal of East Asian Studies* 14, pp. 249-278.
- _____. (2006). The Defeat of Centralized Paternalism: Factionalism, Assertive Regional Cadres, and the Long Fall of Golkar Chairman Akbar Tanjung. *Indonesia* 81, 1-22.
- Tsebelis, George and Eunyoung Ha. (2014). Coalition Theory: A Veto Player's Approach. *European Political Science Review*. Vol. 63 No. 3, pp. 331-357.